

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012.
- Komnas HAM RI. *Disabilitas dan RKUHP 2015: Kajian Hukum dan HAM*. Jakarta: Komnas HAM, 2015.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Kajian Disabilitas: Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia* dari Aspek Sosioekonomi dan Yuridis. Jakarta: KemenPPPA, 2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Kemenkes RI, Jakarta, 2018.
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (MA RI dan UNDP). *Panduan Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: MA RI & UNDP, 2021.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga. *Melayani Penyandang Disabilitas: Tugas Hakim dan Aparatur Pengadilan*. Surabaya: PUSHAM UNAIR, 2021.
- Rachmawati, Titin. *Hukum Disabilitas di Indonesia*. Yogyakarta:346 Deepublish, 2019.
- Sihombing, Ruth Elizabeth. *Kerangka Hukum Disabilitas di INDONESIA*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Suharto, Eko Saputra. *Buku Disabilitas*. Jakarta: *Pusat Kajian Disabilitas Indonesia*, 2019.

B. Jurnal

- Barkah, Aah Laelatul, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Erna Listiawati et. al., "Access to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law," *Simbur*

- Cahaya, Universitas Sriwijaya, 2023.
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/2796>
- Fatmawati, Maria. "Analisis Hukum terhadap Pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Hukum Humaniora*, Vol. 7 No. 4 (2022).
- Igvan Nagif Syahyudin et. al., "Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2025.
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/download/1153/1094/5949>
- Khadafi, Andi. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemasungan Orang yang Menderita Skizofrenia di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 1 (2017).
- Menajang, J.T., "Tindak Pidana dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013)," *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 7, 2018.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21345>
- Ndruru, Putriani, dkk., "Tinjauan Yuridis Pasal 333 Juncto Pasal 55 KUHPidana Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain (Studi Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN.Medan)," *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2022. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/download/5454/3673/23139>
- Purnomosidi, Arie, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>
- Ruhman, Muhammad. "Tindak Pidana terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 3 No. 1 (2023).
- Risqi Rismayani1 & Ufran, "Peran Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemasungan ODGJ," *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2023.
<https://ojs.ninetyjournal.com/index.php/IURIS/article/download/58/32/232>
- Sodiqin, Ali, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, 2021. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>
- Vavinta Ida, Orintina dan Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Memiliki Gangguan Mental," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Widya Kartika*, 2023.
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/620/164/1644>

Wahyuni, Sri Agustina, Toto Rerat, dan Neni Hayat. "Tanggungjawab Pemerintah terhadap Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa oleh Masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Standar Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 2 (2025): 803–813.

Wahid Nurrohman & Pudji Astuti "Analisis Yuridis Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dikaitkan Dengan Pasal 333 Ayat (1) KUHP Tentang Perampasan Kemerdekaan (Studi Kasus di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)," *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 03, Juli 2018.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36069>

Williasari, E., Prasetyo, T., dan Jaeni, A., "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 1, 2024.
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3700>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2561 K/Pid.SUS/2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

D. Website

Cyndinny, E. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa di Jawa Barat," Perpustakaan Saleh Adiwinata, diakses 21 Maret 2026.

http://elib.hukum.unpas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7365

Pengadilan Agama Jombang, "Access to Justice bagi Penyandang Disabilitas," diakses 21 Maret 2026. <https://www.pa-jombang.go.id/article/Access-to-Justice-bagi-Penyandang-Disabilitas>

“Kapolres Lumajang Bebaskan dan Bantu Pengobatan ODGJ yang Dipasung.” Polres Madiun, 19 November 2025.

“Panti Aura Welas Asih Bebaskan Puluhan ODGJ yang Dipasung Keluarga.” ANTARA News, 19 November 2025.

“Setukpa Polri Bantu ODGJ Dipasung, Akan Dibawa ke Yayasan Purnomo di Lamongan.” Setukpa Polri News, 19 November 2025.